



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Juli 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUMIRAH
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
3. NHK : 971090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/110 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1.289 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **34.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA STARLET EP 81 Tahun 1991, Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **5.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.189.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **20.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.169.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.